



Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibu Kota
Jakarta



Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu



Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah

Tahun 2022

Seribu Pulau
Seribu Pesona

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2022 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

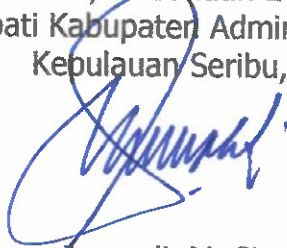
Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,

diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

Jakarta, 25 Januari 2023
Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Junaedi, M. Si
NIP. 196612051987031003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan Untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berusaha melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja dengan baik, memiliki kinerja yang jelas dan terukur.

Pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menetapkan 19 (sembilan belas) indikator kinerja yang akan diwujudkan pada tahun 2022, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	91	N/A	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi,	88,5	89,45	101%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM			
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	91%	93,41%	102,64%
4	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	100%	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		(KSD Nomor 39)	Pemerintahan dengan predikat AA (Nomor 39)			
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya)	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (Nomor 45)	100%	100%	100%
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 47)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu (Nomor 47)	100%	100%	100%
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan (Nomor 66)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)			
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%
11	Peningkatan penggunaan eOffice dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD dari SKPD tersebut			
12	Peningkatan penggunaan eProduk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	100%	100%	100%
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional baadn pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,	WTP	WTP	WTP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3 (100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)			
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template communication plan mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Diskominfofik. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfofik menyusun calendar of events dan communication tools standard di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfofik per triwulan. d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh			

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Asisten.			
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	91	94,41	103,74%
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management	95	96,55	96,55

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB			
17	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan	100%	100%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemeriksaan eksternal (BPK)	rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)			
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%
19	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja terdapat 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang mencapai target, 1 (satu) indikator kinerja belum dapat diukur

dikarenakan penilaian oleh Kementerian PAN RB belum tersedia dan 1 (satu) indikator kinerja tidak tercapai.

Pada Tahun 2022 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mempunyai 19 (sembilan belas) program dengan pagu anggaran sebesar Rp 218.253.100.795 dan terealisasi sebesar Rp 201.952.776.487 maka capaian pada Tahun 2022 sebesar 92,53%. Dari Anggaran tersebut Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat efisiensi sebesar 7,47%.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya antara lain :

1. Peningkatan infrastruktur menjadi faktor untuk mendukung Kepulauan Seribu sebagai Destinasi Pariwisata Dunia dan mendukung peningkatan minat kunjungan Pariwisata di Kepulauan Seribu;
2. Masih lemahnya kinerja di bidang pelayanan kepariwisataan dan transportasi laut;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, beberapa upaya perlu dilakukan adalah:

1. Peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata sebagai destinasi pariwisata dunia;
2. Melakukan penyuluhan tentang peraturan-peraturan di bidang Pemanfaatan Ruang Kota, Transporatasi, Pariwisata dan Kebersihan;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui penyuluhan, monitoring langsung ke lapangan dan melakukan pendekatan silaturahmi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus RT/RW, dan masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	xvi
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang.....	1
Dasar Hukum.....	3
Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	4
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	5
Pernyataan Visi	9
Pernyataan Misi	10
Aspek Strategis	10
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2022	12
Rencana Strategis	12

Perjanjian Kinerja.....	12
Tujuan dan Sasaran	22
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	25
Capaian Kinerja.....	25
Capaian Strategis Kinerja	31
Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	43
Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan.....	49
Bab 4 : Penutup	65
Kesimpulan.....	66
Saran	66
Tindak Lanjut.....	67
Lampiran-lampiran	68



BAB

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik / *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance*. Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/ stakeholder) Kepulauan Seribu. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Kepulauan Seribu mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari tahun-ketahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan

masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah. Mekanisme pengukuran kinerja dengan penekanan pada kemampuan menyerap anggaran sudah tidak ideal lagi saat ini apabila dibandingkan dengan hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dimana pada kenyataannya masih berada jauh di bawah tingkat yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengukur semua pprogram satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi masyarakat.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholder dengan memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Melalui identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Sehingga laporan kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
9. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0050 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.

Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu terdiri atas gugusan pulau - pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 871,23 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 98 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk yang berupa pulau milik pribadi, resort, cagar alam, wisata bahari, dan lain –lain.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Geografis

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara 106°25' – 106°4'BT dan 5°24' – 5°45'LS dengan Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu luas wilayah 871,23 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut Jawa
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Selatan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja dan Tangerang Barat
- Sebelah Barat Laut Jawa dan Selat Sunda

Topografis

Wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagian besar terdiri dari perairan / lautan dan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 2 meter di atas permukaan laut, luas daratan terutama di sepanjang pantai.

Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Serta terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

Sejalan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 13 (tiga belas) suku dinas, 3 (tiga) suku badan, 4 (empat) unit pelayanan/penyelenggara/pengelola dan 3 (tiga) instansi vertikal.

Penduduk

Jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkisar 28.224 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 2.717 jiwa per km². Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Seribu Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Selatan dari total penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini, maka disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan selain itu dalam melaksanakan tugas tambahan SKPD di Kabupaten Administrasi berpedoman kepada arahan dan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka susunan organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Bina Pemerintahan
 2. Sub Bagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 3. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Hukum
 - 2) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian dan KORPRI Kabupaten.

2. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Tata Usaha dan Protokol
 - 2) Subbagian Rumah Tangga
 - 3) Subbagian Perlengkapan.
 - b) Bagian Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran
 - 2) Subbagian Keuangan.
 - c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perekonomian
 - 2) Sub Bagian Pembangunan.
4. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari:
 - a) Seksi Sosial
 - b) Seksi Pemuda dan Olahraga
 - c) Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
5. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencahayaan Kabupaten
 - b) Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
 - c) Seksi Bina Marga
6. Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Subbagian Program dan Anggaran
 - 3) Subbagian Keuangan
 - b) Seksi Pemerintahan
 - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e) Kelurahan, terdiri dari
 - 1) Lurah
 - 2) Wakil Lurah

- 3) Sekretariat Kelurahan
- 4) Seksi Pemerintahan
- 5) Seksi Kesejahteraan Rakyat
- 6) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi;
- b. menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Administrasi;
- c. memimpin, mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabupaten, Unit Kerja Teknis, Kecamatan dan Kelurahan;
- d. mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
- e. memimpin, mengoordinasikan, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan penanggulangan bencana di tingkat Kabupaten Administrasi; dan
- f. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan PD/ UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi.

Sumber Daya Manusia Kabupaten Administrasi

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki SDM yang beragam. Jumlah PNS tahun 2022 seluruhnya sebanyak 193 orang yang terdiri dari PNS laki-laki sebanyak 162 orang dan PNS perempuan sebanyak 31 orang. Untuk PNS dengan jabatan Eselon II, III dan IV semuanya berjumlah 75 orang. Adapun untuk jumlah PJLP di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 691 dan untuk pegawai dengan status P3K tidak ada.

Tabel 1. Rekapitulasi Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Kategori Pegawai		
Total PNS	P3K	PJLP
193	N/A	691

Aspek Strategis

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagi permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Legalitas Usaha Pariwisata dimana masih banyaknya Industri Pariwisata yang tidak memiliki Perizinan (NIB) dan Sertifikasi Usaha dan kendala yang dihadapi adalah Masih Kurangnya Kesadaran Pemilik Usaha untuk mengurus Nomor Induk berusaha (NIB).
2. Sumber Energi yang belum merata di setiap pulau mengakibatkan masih ada Resort dan Pulau Sejarah yang belum mendapatkan Aliran listrik dengan kendala yang dihadapi yaitu belum adanya koordinasi dari pihak-pihak terkait;
3. Penataan Aset dimana kondisi sekarang belum memiliki lahan untuk lokasi penempatan TIC Portable di Pulau Harapan, Pulau Kelapa, Pulau Tidung dan Pulau Untung Jawa. Kendala yang dihadapi Sudin Parekraf tidak memiliki aset lahan di 4 Pulau tersebut (Harapan, Kelapa, Tidung, dan Untung Jawa);

4. Minimnya Sarana dan Prasarana UKM untuk berwirausaha dikarenakan Lahan dan anggaran yang terbatas;
5. Pemberdayaan Masyarakat berupa Pendampingan Kewirausahaan Jakpreneur karena kurangnya pengetahuan dari para pelaku usaha UKM;
6. Pencatatan Aset Tanah terkendala Kelurahan tidak dapat menerbitkan surat pernyataan tidak sengketa dan Surat asli tanah dikuasai oleh pihak masyarakat (mantan pengurus barang PKM Seribu Utara);
7. Pemanfaatan lahan tanah yang ada di depan Puskesmas Kecamatan Seribu Utara Lahan saat ini digunakan sebagai taman dan area tempat bermain anak – anak berpotensi menghalangi jalur evakuasi pasien rujukan menuju dermaga.



BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Sebagai suatu lembaga pemerintah yang merupakan perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membawa visi Gubernur yang ketiga yaitu Kesejahteraan Bagi Semua. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya, serta peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif meritokratis, dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;

Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Rencana Strategis

Perjanjian kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebuah kesepakatan yang dibuat antara Bupati dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam perjanjian ini, Bupati bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Selanjutnya dalam perjanjian kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 9 sasaran strategis dengan Indikator Kinerjanya sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi dengan Target nilai 91
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Target nilai 88,5
3. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan Target nilai 91%
4. Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20) dengan target nilai 100%
5. Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (KSD Nomor 39) dengan target nilai 100%
6. Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45) dengan target nilai 100%
7. Persentase penyelesaian Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 47) dengan target nilai 100%
8. Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61) dengan target nilai 100%
9. Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD Nomor 66) dengan target nilai 100%

Indikator Kinerja yang pelaksanaannya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran maka apabila anggarannya tidak dapat dicairkan atau tanpa anggaran sekalipun namun masuk dalam perjanjian kinerja maka masih tetap dapat diukur output dan outcomenya. Target kinerja yang realisasinya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran mayoritas besar merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif.

Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka disusun Perjanjian Kinerja yang ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja ini kemudian dilakukan dibuat Penetapan Perjanjian Kinerja yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja 2022 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dokumen yang menyajikan target kinerja untuk Tahun 2022.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
Sasaran Strategis							
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi , yaitu: a. Manajemen Perubahan b. Penguatan pengawasan c. Penguatan akuntabilitas d. Penataan Organisasi e. Penataan tatalaksana f. Penataan manajemen SDM g. Deregulasi Kebijakan h. Peningkatan kualitas	N/A	N/A	N/A	91

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			pelayanan publik. Adapun penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kementerian PAN-RB				
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan (termasuk di kelurahan)	Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Biro ORB sesuai tugas melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM	N/A	N/A	N/A	88,5

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Hasil perhitungan terhadap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	N/A	N/A	N/A	91%
4	Meningkatnya kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu nomor (20)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (nomor 20)	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA nomor (39)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (nomor 39)	100%	100%	100%	100%
6	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (KSD Nomor 45)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman dan Masyarakat (Nomor 45)	100%	100%	100%	100%
7	Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan berkelanjutan, berikut sarana prasarana	Persentase penyelesaian Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 47)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Membangun Pasar Terpadu di Kepulauan Seribu (Nomor 47)	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
	pendukungnya						
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%	100%
9	Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan nomor (66)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Peran Walikota/ Bupati dalam penataan kawasan (nomor 66)	100%	100%	100%	100%

Sasaran Khusus

10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan	N/A	3	N/A	N/A

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))				
12	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template <i>communication plan</i> mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan*Verifikasi <i>communication plan</i> dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfo menyusun <i>calendar of events</i> dan <i>communication tools standard</i> di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi	N/A	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfo per triwulan .d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.				
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	N/A	N/A	N/A	A (91)
14	Peningkatan penggunaan eOffice dalam kegiatan administrasi persuratan	Jumlah Surat atau Nota Dinas masuk ke akun Seluruh SKPD yang terproses / terdisposisi	Jumlah surat masuk sama dengan Jumlah surat terdisposisi / terproses pada hari yang sama. Pengecekan dan pelaporan dapat dimonitoring dengan menggunakan fitur "Laporan Surat Masuk / Surat Keluar atau Disposisi Masuk dan Disposisi keluar yang ada pada e office". Diperlukan penentuan penanggung jawab akun E office di setiap SKPD. Jumlah surat belum terdisposisi / terproses yang terdapat pada fitur "Surat Masuk" di akun E-Office SKPD akan mempengaruhi TKD	100%	100%	100%	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			dari SKPD tersebut				
15	Peningkatan penggunaan eProduk hukum	Jumlah perbal/produk hukum yang dibuat melalui sistem e-perbal	Penyambungan antara sistem e-perbal ke aplikasi e-office. Pemberlakuan TTE dan e-produk hukum menjadi salah satu bagian/fitur dari e-office. Jumlah perbal yang terproses di e-perbal sama dengan jumlah perbal yang terdapat pada Google sheet Rekap Perbal yang terdapat di Biro KSD.	100%	100%	100%	100%
16	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Nilai PMPRB Perangkat Daerah Tahun 2022	Defenisi : Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan	N/A	N/A	N/A	95

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
			sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Formula Pengukuran: Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30 Sumber Data : Lembar Kerja Evaluasi PMPRB				
Sasaran Operasional							
17	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%

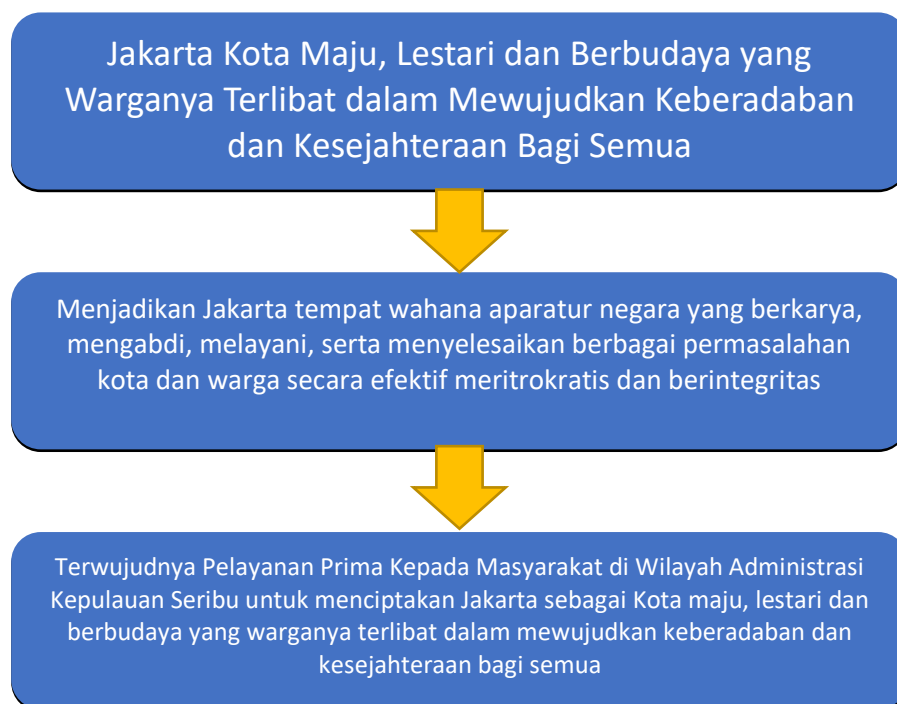
NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Pengukuran Kinerja	Target Triwulan			
				I	II	III	IV
19	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%

Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua”

Adapun keterkaitan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2017-2022. Gambaran lebih lanjut mengenai

keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Target Kinerja Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban dan kesejahteraan bagi semua	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk mewujudkan pelayanan prima	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan (termasuk di kelurahan)	-	3	3	4	4



BAB 3

Data Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam bagian ini menjelaskan tentang capaian indikator kinerja organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 terdapat 19 (sembilan belas) sasaran kinerja yang terbagi menjadi sasaran strategis, sasaran operasional dan sasaran khusus. Sasaran strategis memuat Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan KSD yang diampu oleh Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sasaran Khusus memuat Pemanfaatan E-Order, Opini Laporan Keuangan Daerah, Strategi Komunikasi dan Predikat SAKIP. Sedangkan untuk Sasaran Operasional memuat Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur, Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, Nilai Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK.

Tabel berikut akan membandingkan data capaian kinerja di Tahun 2022 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, juga membandingkannya dengan target RPJMD serta membandingkannya dengan capaian kabupaten lain di Indonesia yaitu Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah dan Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dengan adanya perbandingan ini akan memperjelas posisi capaian yang ada di Tahun 2022 dan memberi informasi mengenai trend dari kondisi capaian beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	91	N/A	78,88	76,54	85
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	88,5	89,45	87,72	86,08	88,5
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	Perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja setiap Triwulan dalam angka persentase	91%	93,41%	92,23%	94,31%	91%
4	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (Nomor 20)	100%	100%	100%	100%	N/A
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Meraih Laporan Keuangan	N/A	N/A	100%	100%	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
		Pengecualian (WTP) (KSD Nomor 38)	Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Nomor 38)					
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%	100%	N/A
7	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 51)	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu (Nomor 51)	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
8	Meningkatnya akses sanitasi layak	Persentase Penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (KSD Nomor 52)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Limbah di Kepulauan Seribu (Nomor 52)	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
			(Nomor 61)					
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian Implementasi SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (KSD Nomor 63)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	N/A	N/A	100%	100%	N/A
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Nomor 66)	Realisasi penyelesaian dibanding target penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan (Nomor 66)	100%	100%	100%	100%	N/A
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	88,41%	100%	N/A
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	Pernyataan profesional baadn pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
			pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3 (100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%)					
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	a) Persentase penyusunan communication plan (strategi komunikasi) program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tahun sesuai dengan PD masing-masing pada bulan April 2021. *Template communication plan mencakup minimal : Identifikasi masalah, Tujuan, Pesan Utama, Target Audience, Rencana Kegiatan dan Editorial plan *Verifikasi communication plan dilakukan oleh Asisten dibantu Diskominfo. b) Persentase penyusunan calendar of events dan communication tools standard untuk program umum dan program unggulan Pemerintah Provinsi	100%	100%	100%	100%	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
			DKI Jakarta per triwulan sesuai dengan PD masing-masing. Diskominfoitk menyusun calendar of events dan communication tools standard di level Provinsi. c) Persentase penyusunan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis sesuai SOP yang disusun Diskominfoitk per triwulan. d) Persentase penyiapan bahan paparan Rapat Koordinasi Komunikasi Publik per bulan dan di Validasi oleh Tim Komunikasi yang dipimpin oleh Asisten.					
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	Nilai/Predikat minimal A diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi (nilai:81)	91	94,41	94,22	N/A	91
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah	100%	100%	100%	100%	N/A

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun Ke-5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
		eksternal (BPK)	koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)					
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai diperoleh dari sistem Jaksurvei	93	89,81	92,4	N/A	93
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks ini menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

- Realisasi Capaian vs Target

Sampai dengan laporan ini dibuat, hasil penilaian IRB yang dilakukan oleh Kemenpanrb belum keluar sehingga tidak dapat diukur capaiannya (capaian N/A).

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengindik ke nilai Provinsi DKI Jakarta yang mendapat nilai 78,88 pada Tahun 2021 dan 76,54 pada Tahun 2020.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu sebesar 91. Dilihat dari trend pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 yang meningkat, maka diharapkan nilai pada Tahun 2022 juga dapat meningkat dari tahun sebelumnya.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks ini merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2022 targetnya adalah 88,5 sedangkan realisasinya sebesar 89,45 sehingga capaiannya adalah 101%. Pada Tahun 2022 pelaksanaan survey pengukuran IKM dilakukan terhadap 6 jenis pelayanan yaitu PPSU, PKK, Posyandu, Ketertiban Umum, RPTRA dan Jumantik.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Nilai indeks ini lebih tinggi dari targetnya, bahkan capaiannya melampaui jauh diatas target dengan trend dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-5 yaitu sebesar 88,5. Hasil yang dicapai pada tahun 2022 sebesar 89,45 dimana ada peningkatan sebesar 1,73 poin dibanding tahun 2021.

3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Pengukuran Kualitas Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan 3 komponen yaitu penyerapan anggaran, efisiensi anggaran dan pencapaian output.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2022 capaian indikator ini mencapai 93,41% dari target 91% sehingga capaiannya adalah 102,64%. Meskipun terdapat perubahan anggaran pada Tahun 2022, namun seluruh program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik walaupun anggarannya dipangkas maupun ditiadakan.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian pada Tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, sedangkan apabila dibandingkan dengan tahun 2019, capaiannya lebih tinggi. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2021 ini banyak efisiensi pada kegiatan fisik, sedangkan pada tahun 2020 hampir seluruh kegiatan fisik tidak dilaksanakan karena *refocusing* karena anggaran digunakan untuk penanganan Covid-19.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini target RPJMD pada tahun ke-4 yaitu sebesar 91%. Berdasarkan data pada tabel, pada tahun 2022 capaian Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 93,41%, sehingga target pada RPJMD sudah terpenuhi.

4. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 20

Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu dengan renaksi yaitu pelaksanaan sosialisasi pendaftaran kewirausahaan terpadu di kelurahan yang dapat diselesaikan sesuai target dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2021 dan 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

5. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 39

Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA. Adapun renaksinya adalah Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang telah selesai sesuai dengan kriteria ketuntasan dan dengan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2022, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

6. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 51

Persentase penyelesaian Penyediaan Pengolahan dan Pengelolaan Air Bersih di Kepulauan Seribu dengan renaksi Kejelasan Lahan Lokasi Rencana Pembangunan IPA di Pulau Pari yang telah diselesaikan dengan tuntas dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

7. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 61

Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan dengan renaksi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2022 yang telah diselesaikan tuntas dan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2021, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

8. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 66

Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam Penataan Kawasan dengan renaksi Persetujuan Lokasi Penataan Kawasan TA 2022 di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat diselesaikan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh renaksi yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja KSD, renaksi tiap tahunnya berbeda-beda. Pada capaian tahun 2021 dan 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja KSD ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

9. Persentase Pemanfaatan e-Order

Pengukuran jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2022 jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman senilai Rp. 3.919.764.943, adapun realisasinya senilai Rp. 3.347.677.840 dan sisa anggaran senilai Rp. 572.087.103. Sehingga capaiannya 85.40%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada Tahun 2021 capaiannya adalah 88,41%, sedangkan pada Tahun 2019 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

10. Opini Laporan Keuangan Daerah

Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan. Pengukuran indikator ini merupakan tanggung jawab kolektif dalam upaya mendukung pencapaian predikat WTP Provinsi DKI Jakarta.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021, 2020 dan 2019, indikator ini capaiannya juga 100% dengan diperolehnya WTP oleh tingkat Provinsi DKI Jakarta.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

11. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik

Pengukuran persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh dokumen yang menjadi data pendukung tercapainya pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik telah dibuat dan diupload kedalam sistem tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2020 dan 2019 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

12. Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Pengukuran dilakukan dengan perolehan Nilai/Predikat minimal A dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat yang mendukung capaian nilai SAKIP Provinsi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target nilai untuk tahun 2022 adalah 91, sedangkan Kabupaten Kepulauan Seribu berhasil mendapatkan nilai 94,41. Seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini Tahun 2021 berhasil mendapatkan nilai 94,41. 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

13. Persentase Progres TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal

Pengukuran dilakukan dengan menghitung persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Temuan yang menjadi target untuk diselesaikan sebanyak 2 temuan yaitu Pelaksanaan Verifikasi Listing Gaji/TPP dan pemuktakhiran Status Pegawai Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Sosialisasi Updating Data Pegawai.

Terhadap temuan tersebut sudah diselesaikan sesuai aturan perundang-undangan dan diselesaikan tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021 dan 2020 indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 capaiannya adalah 87,5%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

14. Survey Kepuasan Layanan Masyarakat

Pengukuran dilakukan dengan menghitung hasil jawaban pada kuesioner Jaksurvey dari para responden yang telah ditentukan sebelumnya. Responden berasal dari para ketua RT, ketua RW, LMK, FKDM, Forkopimda, TP-PKK dan lainnya pada setiap masing-masing tingkatan wilayah.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2022 adalah 95 dan capaiannya adalah 97,62 sehingga capaiannya 100%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu kegiatan pada Tahun 2022 seluruh kegiatan pelayanan telah berjalan normal dan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan baik.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021, indikator ini capaiannya juga 92.4. Sedangkan pada Tahun 2019 dan 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

15. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (capaian 100%)

Pengukuran dilakukan dengan Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2022, jumlah aduan yang masuk sebanyak 41 aduan. Seluruh aduan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan aturan yang ada. Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021, 2020 dan 2019 indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

16. Persentase Penyelesaian TL Arahan Gubernur

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) yang diselesaikan dengan Jumlah keseluruhan TL Arahan Gubernur yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%. Pada tahun 2022 tidak terdapat TL Arahan Gubernur yang masuk.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada capaian tahun 2021 dan 2020, indikator ini capaiannya juga 100%. Sedangkan pada Tahun 2018 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak mendapat indikator kinerja ini.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

Selain itu untuk memperkuat data realisasi perbandingan capaian, maka berikut disajikan perbandingan capaian dengan kabupaten lain di Indonesia untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 5. Perbandingan IKU dengan Daerah lain

Indikator Kinerja Utama	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Garut
Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat	89,45%	83,37%	84,91%
Kualitas pelaksanaan Anggaran	93,41%	93,61%	94,14%

Pada Tabel di atas disajikan data perbandingan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut di mana kedua Kabupaten tersebut masuk zona hijau dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik yang dinilai Ombudsman RI pada Tahun 2022. Untuk Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pada Tahun 2022 ini masih belum dirilis resmi oleh Kementerian PANRB. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meraih nilai 89,45% untuk Indeks Kepuasan Masyarakat unggul dibanding Kabupaten Grobogan dan Garut. Kemudian dalam hal Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu masuk dalam kategori baik dengan nilai sebesar 93,41% sedikit lebih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Grobogan sebesar 93,61% dan Garut 94,14%.

Pengaruh Capaian Kinerja terhadap Budaya Organisasi

Capaian kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Capaian kinerja yang baik dapat memiliki pengaruh positif pada budaya kinerja organisasi. Beberapa pengaruh dari capaian kinerja terhadap budaya kinerja organisasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Capaian kinerja yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi.
2. Menciptakan budaya kerja yang positif. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan budaya kerja yang positif di mana karyawan merasa bahwa mereka berada di tempat yang tepat dan bahwa kerja mereka dihargai.
3. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat di mana karyawan merasa aman dan dihargai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja.
4. Menciptakan budaya inovatif. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan budaya di mana karyawan merasa diuntungkan dengan mencari cara baru untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga meningkatkan inovasi dan kreativitas.
5. Menciptakan budaya keterbukaan dan transparansi. Capaian kinerja yang baik dapat menciptakan budaya di mana karyawan merasa diuntungkan dengan berbagi informasi dan berkomunikasi dengan baik, sehingga meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam organisasi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan dapat terlihat melalui efisiensi sumber daya keuangan yang dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - [\text{realisasi biaya} / \text{target biaya} \times 100\%]$$

Tingkat efisiensi dapat dihitung manakala target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dapat diukur (N/A). Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2022 pada tabel dibawah.

Tabel 6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat di Wilayah Administrasi Kepulauan Seribu untuk menciptakan Jakarta sebagai kota maju lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban dan kesejahteraan bagi semua	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan untuk Mewujudkan Pelayanan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	93.85%	6.15%
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan anggaran	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100%	93,41%	6,59%
4	Meningkatnya Kewirausahaan baru	Persentase penyelesaian Program Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (KSD Nomor 20)	100%	100%	0%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dengan predikat AA (KSD Nomor 39)	100%	98,13%	1.87%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (KSD Nomor 61)	100%	96.26%	3.74%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian Penguatan Peran Walikota/Bupati dalam penataan kawasan (KSD Nomor 66)	100%	100%	0%
12	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam	Persentase Pemanfaatan E-Order	85,40%	85,40%	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
	pengadaan Barang dan Jasa				
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	100%	96,26%	3.74%
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program- program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	96,61%	3.39%
15	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	100%	98,13%	1.87%
16	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	98,13%	1.87%
17	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	96.56%	96,26%	N/A
18	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	96,26%	3.74%
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	96,26%	3.74%

Salah satu faktor yang mendukung tingginya penyerapan anggaran adalah adanya APBD perubahan yang ditetapkan di triwulan terakhir. Dengan adanya perubahan ini, maka anggaran yang mengalami keterlambatan (SPD belum turun sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan), anggaran untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (rapat koordinasi menggunakan zoom meeting) dan kegiatan yang terkena refocusing bisa disesuaikan.

Penyerapan anggaran pada tabel di atas diperhitungkan berdasarkan penyerapan anggaran Program di mana kegiatan yang mendukung sasaran tersebut berada, atau diperhitungkan secara keseluruhan.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki beberapa Indikator yang berkaitan dengan Reformasi Birokrasi, antara lain Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80%, Persentase Penanganan Perkara tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat, Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum, Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

2. Indeks Kepuasan Masyarakat

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat adalah :
 - Program Pengelolaan Kota Administrasi. Program ini memiliki Indikator yang berkaitan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat, yaitu Indikator Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi > 80 %.
 - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi.

- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - Program Pengelolaan Kecamatan. Program ini memiliki indikator yang berkaitan dengan capaian survey kepuasan masyarakat, yaitu Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah Yang Memenuhi Standar.
4. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 20
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 20 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator persentase jumlah wirausaha baru yang tercapai dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Jumlah kawasan yang tertata.
5. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 39
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 39 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).
6. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 61
- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 61 adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

7. Persentase Penyelesaian KSD Nomor 66
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja KSD 66 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Indikator yang berkaitan adalah Jumlah Kawasan yang Tertata.
8. Persentase Pemanfaatan e-Order
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja pemanfaatan e-order adalah semua program dengan komponen makan minum rapat.
9. Opini Laporan Keuangan Daerah
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Opini Laporan Keuangan Daerah adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.
10. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja implementasi rencana strategis komunikasi publik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor dan Program Pengelolaan Kota Administrasi dengan Indikator Persentase Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11. Predikat SAKIP Perangkat Daerah
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Capaian predikat SAKIP adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).
12. Persentase Progres TL Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Eksternal
 - Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Capaian predikat SAKIP adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 % dan Persentase Capaian Kinerja Walikota (KPI, Perkin dan Lakip).

13. Survey Kepuasan Masyarakat

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

14. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

15. Persentase Penyelesaian TL Arahan Gubernur

- Program yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja survey kepuasan masyarakat (SKLM) adalah Program Pengelolaan Kota Administrasi. Indikator yang berkaitan adalah Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kota Administrasi > 80 %.

Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan

Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi target pelaksanaan. 7 (tujuh) program merupakan sasaran utama yang memiliki Indikator Sasaran RPJMD yang sama yaitu Indikator Kepuasan Masyarakat. Sedangkan 7 (tujuh) lainnya merupakan program pelimpahan kewenangan. Berikut ditampilkan capaian dari masing-masing program yang mendukung capaian IKU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tabel 7. Program Yang Mendukung Pencapaian IKU Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%	93.797.145.786	89.484.713.071	95,40%
		Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	3 Gedung	3 Gedung	100%	16.080.831.733	14.599.912.240	90,79%
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	4 Indeks	100%	2.998.844.242	2.702.480.206	90,12%
3	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	491.483.996	456.478.900	92,88%
4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Indeks	4 Indeks	100%	29.818.277.139	29.582.844.986	99,21%
5	Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	95%	100%	100%	549.154.999	516.126.000	93,99%
		Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	95%	95,83%	100%	7.154.993.720	6.641.792.539	92,83%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional Kecamatan	4 Indeks	4 Indeks	100%	9.287.977.867	8.821.130.636	94,97%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Indeks Kepuasan Terhadap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Taman dan Makam di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	4 Indeks	100%	33.614.533.167	27.727.673.570	82,49%
6	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.367.057.301	7.303.053.373	99,13%
		Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Indeks	4 Indeks	100%	587.794.200	463.567.215	78,87%
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	95 Persen	100 Persen	100%	0	0	-
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	95 Persen	100 Persen	100%	7.800.000	7.800.000	100%
		Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	90%	98,46%	100%	5.670.000	2.520.000	44,44%
		Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	95%	100%	100%	9.810.000	7.650.000	77,98%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Permasalahan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi yang terselesaikan	90 Persen	100 Persen	100%	279.477.418	259.915.000	93,00%
7	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Jumlah Kawasan yang Tertata	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	6.308.000	6.240.000	98,92%
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	90 Persen	100 Persen	100%	6.500.000	6.500.000	100,00%
		Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Sehat	90 Persen	100 Persen	100%	9.300.000	9.300.000	100,00%
		Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	100%	12.495.000	10.020.000	80,19%
		Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	87 Nilai	85 Nilai	97,70%	74.102.740	65.447.500	88,32%
		Persentase Penanganan Perkara tingkat Kabupaten	95%	100%	100%	125.806.000	24.850.000	19,75%
		Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	95%	100%	100%	35.267.580	31.550.000	89,46%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	95%	100%	100%	664.279.240	634.683.790	95,54%
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	90 Persen	100 Persen	100%	419.600.000	418.625.000	99,77%
9	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	70%	80%	100%	2.623.888.171	2.128.381.091	81,12%
10	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	438.845.436	348.845.800	79,49%
11	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	557.139.073	440.881.400	79,13%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	486.985.103	432.444.462	88,80%
13	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten	4 Indeks	4 Indeks	100%	1.120.019.933	1.044.459.904	93,25%
14	Program Penanganan Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penanganan Bencana	4 Indeks	4 Indeks	100%	88.047.680	36.763.200	41,75%
TOTAL					99,92%	218.253.100.795	201.952.776.487	92,53%

Seluruh Indikator Sasaran tersebut dipantau dan dievaluasi progresnya oleh setiap Unit Kerja dari tingkat Sekretariat sampai dengan Kelurahan yang membidangi urusannya sehingga target bisa tercapai sesuai perencanaan. Dengan menghitung Kinerja Program dan kinerja anggaran kemudian capaian realisasinya dibandingkan dengan target maka didapat efisiensi anggaran sebesar 6,59% di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2022.

Realisasi Anggaran

Secara detail, data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
1	A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4 Indeks	4 Indeks	100%	93.797.145.786	89.484.713.071	95,40%
			Jumlah Kantor dan Rumah Dinas Camat dan Lurah yang memenuhi standar	3 Gedung	3 Gedung	100%	16.080.831.733	14.599.912.240	90,79%
2	B.7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	4 Indeks	100%	2.998.844.242	2.702.480.206	90,12%
3	B.7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Indeks Kepuasan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	491.483.996	456.478.900	92,88%
4	B.7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	4 Indeks	4 Indeks	100%	29.818.277.139	29.582.844.986	99,21%
5	A.7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan	Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	95%	100%	100%	549.154.999	516.126.000	93,99%

No	Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
			Persentase Capaian Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	95%	95,83%	100%	7.154.993.720	6.641.792.539	92,83%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional Kecamatan	4 Indeks	4 Indeks	100%	9.287.977.867	8.821.130.636	94,97%
			Indeks Kepuasan Terhadap Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Taman dan Makam di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	4 Indeks	4 Indeks	100%	33.614.533.167	27.727.673.570	82,49%
6	A.7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Indeks kepuasan pelayanan kendaraan operasional	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.367.057.301	7.303.053.373	99,13%
			Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4 Indeks	4 Indeks	100%	587.794.200	463.567.215	78,87%
			Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan BOP dan BOS	95 Persen	100 Persen	100%	0	0	-
			Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten	95 Persen	100 Persen	100%	7.800.000	7.800.000	100%
			Persentase Capaian Kinerja Bupati (KPI, Perkin dan Lakip)	90%	98,46%	100%	5.670.000	2.520.000	44,44%
			Persentase Penyelesaian Sengketa Hukum	95%	100%	100%	9.810.000	7.650.000	77,98%
			Persentase Permasalahan	90%	100%	100%	279.477.418	259.915.000	93,00%

No	Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi yang terselesaikan						
7	A.7.03.02	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Jumlah Kawasan yang Tertata	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	6.308.000	6.240.000	98,92%
			Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak	90 Persen	100 Persen	100%	6.500.000	6.500.000	100,00%
			Persentase Terselesaikannya Permasalahan Terhadap Pelaksanaan Kabupaten Sehat	90 Persen	100 Persen	100%	9.300.000	9.300.000	100,00%
			Persentase Jumlah Wirausaha Baru Yang Tercapai	90 Persen	100 Persen	100%	12.495.000	10.020.000	80,19%
			Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	87 Nilai	85 Nilai	97,70%	74.102.740	65.447.500	88,32%
			Persentase Penanganan Perkara tingkat Kabupaten	95%	100%	100%	125.806.000	24.850.000	19,75%
			Persentase Terbinanya Lembaga Kemasyarakatan	95%	100%	100%	35.267.580	31.550.000	89,46%
			Persentase Terlaksananya Tugas dan Fungsi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu > 80 %	95%	100%	100%	664.279.240	634.683.790	95,54%

No	Kode	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9
8	B.8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	90 Persen	100 Persen	100%	419.600.000	418.625.000	99,77%
9	A.2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	70%	80%	100%	2.623.888.171	2.128.381.091	81,12%
10	B.8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Tingkat Pemahaman Masyarakat Terkait Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	438.845.436	348.845.800	79,49%
11	A.2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	557.139.073	440.881.400	79,13%
12	A.2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4 Indeks	4 Indeks	100%	486.985.103	432.444.462	88,80%
13	A.2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Kepuasan Pelayanan Perpustakaan Kabupaten	4 Indeks	4 Indeks	100%	1.120.019.933	1.044.459.904	93,25%
14	A.1.06.06	Program Penanganan Bencana	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Penanganan Bencana	4 Indeks	4 Indeks	100%	88.047.680	36.763.200	41,75%
TOTAL						99,92%	218.253.100.795	201.952.776.487	92,53%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 31 Indikator Kinerja Program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022, terdapat 30 Indikator Kinerja Program yang realisasinya mencapai 100% (Predikat Interpretasi Sangat Tinggi). Dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja program tidak tercapai 100% yaitu indikator Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia yang hanya mencapai 97,70%.

Apabila diperhatikan dari realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak mencapai target kinerja keuangan. Sub kegiatan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dalam mencapai target keluaran (output). Hal ini dapat berpotensi terhadap rendahnya capaian Indikator Program dari Sub Kegiatan tersebut apabila Surat Penyediaan Dana (SPD) sub kegiatannya tidak diterbitkan.

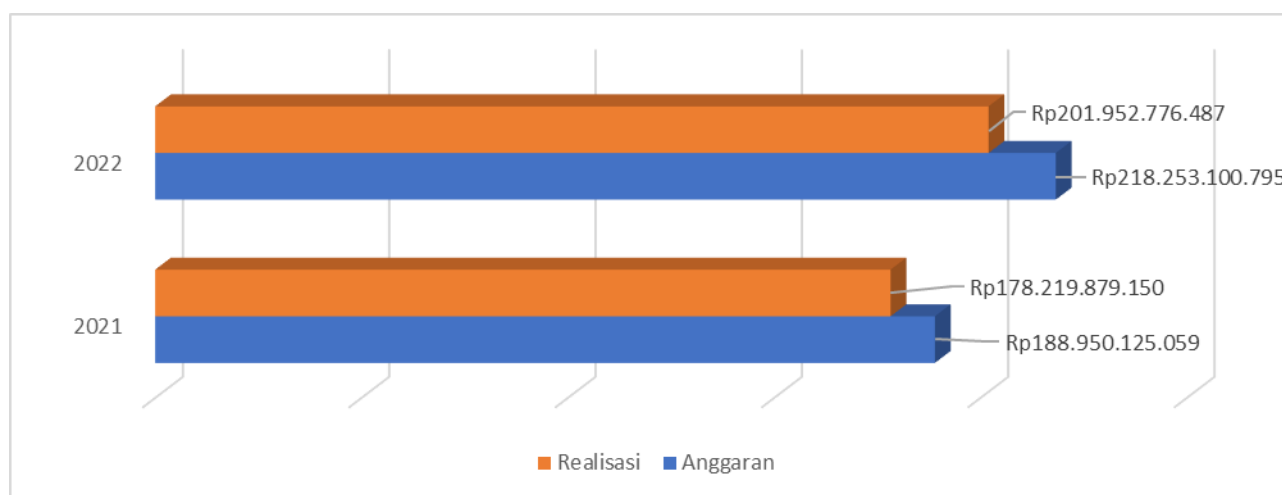
Begitu pula dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat pengadaan, pemeliharaan, pekerjaan fisik, konstruksi, jasa konsultan dan lain-lain, realisasi target kinerja output dan outcome nya sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan perhatian khusus sebagai prioritas utama dalam penyediaan atau penerbitan dananya (SPD) pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian program dan kegiatan diharapkan dapat dilaksanakan sehingga RENSTRA dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Kemudian terkait program kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran maka apabila anggarannya tidak dapat dicairkan maka masih tetap dapat menghasilkan output dan outcome. Target kinerja output dan outcome yang realisasinya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran mayoritas besar merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif.

Selanjutnya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026 antara lain :

1. Memetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026;
2. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta berdasarkan skala prioritas;
3. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan secara maksimal; dan
4. Memperhatikan hal-hal teknis dan administratif setiap kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen belanja yang akan diusulkan dalam Renja.

Pada tahun 2022, anggaran yang diterima ada peningkatan dari Tahun 2021 yakni sebesar Rp 218.253.100.795 berikut grafik perbandingannya di bawah ini.



Grafik 1. Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2021-2022

Berdasarkan Grafik di atas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2021-2022 mempunyai rata-rata realisasi anggaran sekitar 93,36% persen yang sudah terbilang baik. Meskipun secara persentase realisasi anggaran pada tahun 2022 lebih kecil dibanding tahun 2021, namun untuk kedepannya diharapkan dapat lebih tinggi agar target kinerja yang sudah ditetapkan tetap dapat tercapai.



BAB **4** **Penutup**

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2022 dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang terdiri dari 19 (sembilan belas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Program dan kegiatan Tahun 2022 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja selama tahun 2022 ini maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan jajarannya telah dapat diselenggarakan dengan baik sebagaimana target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlihat upaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pendukung Kabupaten.
3. Beberapa keberhasilan tersebut antara lain dapat terlihat pada peningkatan capaian berbagai indikator kinerja utama apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Saran

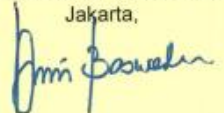
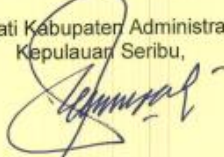
1. Meningkatkan komitmen antar SKPD dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja serta monev capaian kerjanya secara periodik.
2. Mengedukasi masyarakat tentang pencapaian program-program pemerintah agar keberhasilan yang sudah dicapai dapat terkomunikasikan dengan baik di masyarakat luas.

Tindak Lanjut

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membuat strategi komunikasi yang sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan agar pemahaman masyarakat mengenai program pemerintah dapat terinformasikan.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2022 ini dapat menyempurnakan akuntabilitas dan sekaligus masukan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta motivasi bagi kami untuk menjadi lebih baik lagi.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2022

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama :	JUNAEDI
Jabatan :	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama :	ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D
Jabatan :	Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta,	6 Februari 2022
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
	
ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D	JUNAEDI NIP. 196612051987031003

Lampiran 2 Penghargaan Kabupaten Peduli HAM



Lampiran 3 Penghargaan Bank Sampah Unit Kresek Indah RW.01 Kel. Pulau Kelapa

